

AKUNTABILITAS POLITIK
DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KOTA JAMBI

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:

ALDI HIDAYAT

1310831007

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

ABSTRAK

AldiHidayat, 1310831007, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang 2018. Judul skripsi: Akuntabilitas Politik Dalam Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi. Skripsi ini terdiri dari 78 halaman, bahan referensi 4 buku teori dan konsep, 4 buku metode, 2 skripsi, 4 jurnal, dan 2 website internet.

Pembimbing I Dr. AidinilZetra, MA, dan Pembimbing II Zulfadli S.H.I, M.Si.

Skripsi ini menjelaskan Akuntabilitas politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, dengan melihat bagaimana Akuntabilitas politik serta pertanggung jawaban politik BPN Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan format penelitian deskriptif. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelahnannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori akuntabilitas politik oleh Seila Elwood. Lokasi penelitian adalah BPN Kota Jambi. Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan tujuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengukur Akuntabilitas Politik dalam pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi belum berjalan dengan semestinya, dilihat dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan merupakan salah satu indikator dalam menilai bagaimana kesesuaian tersebut mengalami kesesuaian dengan apa yang diinginkan, akan tetapi ini merupakan suatu faktor yang membuat kesesuaian tersebut terkadang tidak semestinya, terkadang SOP yang sudah dibuat dengan terenci masih ada yang menyalahi aturan atau SOP tersebut, yang dimana pada penelitian ini peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian tadi. Sistem Pengawasan yang dijalankan juga menjadikendala yaitu belum maksimalnya sistem pengawasan yang dilakukan kepada BPN Kota Jambi. Sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Kecurangan atau bermainnya oknum di kantor BPN kota jambi terdapat berupa sanksi atau teguran dari BPN Provinsi Jambi yang dalam hal ini juga merupakan proses akuntabilitas politik yang harus dijalankan. Dan yang terakhir yaitu output dan outcome yang terukur Dengan cara membuat laporan bulan andan tahunan selama kinerja pelayanan berjalan pada kesempatan ini Bentuk pelaporan sendiri itu di sampaikan ini terkait bentuk evaluasi dan berbagai temuan yang ada di BPN Kota jambi itu kepada DPRD kota dan DPRD Provinsi Jambi.

Kata kunci: Akuntabilitas Politik, Transparansi

ABSTRACT

Aldi Hidayat, 1310831007, The Department of Political Science, The Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2018. The Title of The Thesis: Political Accountability in Service Making Certificate of Land in National Land Agency (BPN) of Jambi City. This thesis consists of 78 pages, reference material 4 theoretical and concept books, 4 method books, 2 theses, 4 journals, and 2 internet websites.

Advisor 1 :Dr. AidinilZetra, MA Advisor 2 : Zulfadli S.H.I, M.Si.

This thesis explains political accountability in the service of land certificate of Land Agency of National Land (BPN) of Jambi City, by studying how political accountability and political responsibility of BPN Jambi City. The research uses qualitative approach, with type of approach used is case study with descriptive research format. Case study is a type of approach in research that has been focused on one case intensively, deeply, in detail, and comprehensively. In this study the theory used is the theory of political accountability by Seila Elwood. The research location is BPN Kota Jambi. The process of collecting research data is conducted by interview and documentation method. The selection of researcher informants uses purposive sampling technique, with criteria determined in accordance with the purpose.

The results of this study show that in measuring Political Accountability in the service of making land certificate in the Office of Land Agency of Jambi City has not been conducted properly, in terms of the conformity between the implementation with the standard of implementation procedure is one of the indicators in assessing how the suitability experienced the suitability of what want, but this is a factor that makes the suitability is sometimes not appropriate, sometimes SOPs that have been made with haters still exist that violate the rules or SOP, which in this research the researchers found the mismatch earlier. Monitoring system is also an obstacle that is not the maximum supervision system conducted to BPN Jambi. Sanctions are set for errors or omissions in the execution of activities. In case of cheating or playing his person in the office of BPN jambi city there is a sanction or reprimand from BPN Jambi Province which in this case is also a process of political accountability that must be on the run. And the last is measurable outputs and outcomes By making monthly and annual reports during the performance of the service running on this occasion This form of reporting itself is conveyed in relation to the form of evaluation and findings of various findings in BPN Kota Jambi to the City DPRD and Provincial DPRD of Jambi.

Keywords: Political Accountability, Transparency